

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-undang No.17 tahun 2003 menjelaskan mengenai keuangan negara, yaitu laporan keuangan sektor publik adalah hasil representasi keuangan, adapun yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yaitu transaksi dimana tujuannya untuk menjelaskan dan menginformasikan mengenai berbagai informasi kepada informan untuk di ketahui tentang arahan dan keuangan yang berpengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan. Bentuk penyajian laporan yang menjadi informasi keuangan bagi suatu entitas sektor publik berguna dan bermanfaat bagi para pengguna, yang mana hal ini merupakan tujuan dari laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan dalam Pengambilan keputusan, baik ekonomi, keputusan sosial, ,maupun keputusan politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut menyebutkan mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Suwanda, 2015, 18–19) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Suwanda, 2015:22)

Untuk menilai pelaksanaan dari kinerja keuangan daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini dipublikasikan oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi yang bermanfaat untuk para pengguna kepentingan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mempunyai peran penting dibandingkan dengan neraca, karena pada dasarnya penyajian Realisasi anggaran belanja antara anggaran dan realisasi selama satu periode dalam penyajian laporan keuangan entitas sektor publik. Laporan Keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dapat dipahami dan memiliki karakteristik, dapat diandalkan, di bandingkan dan relevan. Kalau semua itu sudah ada dalam laporan keuangan suatu instansi maka dapat dikatakan instansi tersebut menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan daerah yang utama sebelum penyajian laporan keuangan neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas, yaitu laporan keuangan mengenai Realisasi Anggaran. Kemudian dalam penyajian laporan keuangan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan. Salah satu unsur yang terdapat dalam laporan keuangan realisasi anggaran yaitu Belanja. Laporan Realisasi Anggaran yaitu suatu komponen laporan keuangan yang dalam penyajian laporan keuangannya menyajikan suatu informasi mengenai Realisasi dan Anggaran. Yang mana tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan oleh pertauran perundang-undangan. Dalam satu tahun Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan satu kali. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sehingga menonjolkan berbagai

unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SILPA).

Anggaran menurut pandangan Sumenge (2003:75). Yaitu berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan yaitu mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian yaitu mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan. Untuk menunjang terlaksananya program kegiatan organisasi, anggaran memegang peranan penting karena anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam suatu perusahaan atau instansi. Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya supaya lebih berorientasi pada terciptanya *good governance dan good public*, seiring dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Abdullah dan Halim (2006), bahwa anggaran pemerintah daerah terutama dalam APBD yang merupakan bentuk keluaran (*output*) dari pengalokasian Sumber Daya. Pada kenyataannya dalam anggaran tercermin kebutuhan masyarakat dengan berbagai potensi, sumber daya yang dimiliki dan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja merupakan komponen yang terpenting yang mana banyak diperhatikan oleh publik. Karena satu sumber dana yang diperoleh pemerintah, masyarakat merasakan bahwa hal itu merupakan sumbangsih dari

publik melalui pajak. belanja menghasilkan pendapatan lebih sulit dibandingkan membelanjakan karena belanja menunjukkan bagaimana kebijakan dari sebuah instansi.

Klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Yang mana yang termasuk kedalam belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial (Suwanda, 2015 : 41– 42). Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Suwanda, 2015: 99) jadi belanja menurut pandangan Suwanda yaitu semua bentuk pengeluaran yang mana pengeluarannya dari kas umum daerah sehingga mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran digunakan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan, yang salah satu klasifikasinya mengenai Laporan Realisasi Anggaran, yaitu mengenai pendapatan dan belanja. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 klasifikasi Belanja untuk pelaporan keuangan menjadi :

“Belanja Operasi, yaitu merupakan pengeluaran anggaran rutin untuk kegiatan sehari-hari dalam suatu instansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah yang manfaatnya dalam jangka pendek. Yang termasuk kedalam Belanja Operasi yaitu: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja bantuan sosial.”

“Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk

Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Belanja Modal Aset tetap lainnya.”

“Belanja Tidak Terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti halnya bencana sosial, penanggulangan bencana alam, dan yang lainnya. Yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah.”

Dalam menjalankan aktifitasnya organisasi sektor publik mendapat tuntutan baru yaitu harus memperhatikan *value for money*. Dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna), kemudian dalam penggunaan Sumber Daya alam itu harus ekonomis, artinya dalam penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dapat dimaksimalkan serta efektif (berhasil guna) dalam artian mencapai tujuan dan sasaran, yang di sebut dengan *value For Money*. Pelaksanaan kinerja keuangan daerah menurut pandangan Mahmudi (Mahmudi 2011) yaitu salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang hasil analisisnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pelaksanaan Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari hasil suatu pekerjaan di bidang keuangan daerah, yaitu meliputi pendapatan dan belanja daerah, dengan menggunakan indicator keuangann yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode.

Setiap tahun di Indonesia fenomena rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja selalu terjadi baik ditingkat kementerian atau lembaga maupun tingkat Daerah. Fenomena tersebut salah satunya yang terjadi di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 ini terjadi penurunan realisasi

anggaran belanja operasi terutama dalam belanja pegawai. Dalam data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2019 terlihat antara target dan realisasi tidak sesuai dengan yang di diharapkan, beda halnya dengan tahun 2017 dan 2018 yang mana dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanjanya mengalami kenaikan dan dapat dikatakan efektif. Berdasarkan data yang di terima oleh peneliti dari Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan dalam akuntansi sektor publik terutama dalam belanja, kurang dan lebihnya dalam realisasi itu dikatan sebagai masalah. Permasalahan tersebut sebagaimana data yang dari peroleh peneliti sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sodonghilir Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
2017	5	Belanja	1.736.313.786,00	1.668.219.391,00	96,08
2018	5	Belanja	1.993.701.167,00	1.922.447.796,00	96,43
2019	2	Belanja	1.850.067.000,00	1.547.092.474,00	83,63
2020	5	Belanja	1.582.267.000,00	1.466.947.921,00	92,71

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sodonghilir Tahun 2017-2020*

Dalam data pada tahun 2017 total anggaran belanja sebesar Rp.1.736.313.786,00. dan anggaran tersebut terealisasikan sebesar Rp. 1.668.219.391,00 sehingga terdapat silpa yaitu sebesar Rp. 68.094.395. atau dalam persentase anggaran mencapai 96,08 %, maka

data pada tahun 2017 ini dalam pelaksanaan realisasi anggaran dikatakan baik karena mencapai 96,08%.

selanjutnya yaitu total anggaran belanja pada tahun 2018 dalam pelaksanaan anggaran belanjanya meningkat dan dikatakan efektif karena mencapai persentase 96,43%. Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018. Yang mana pada tahun 2018 anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.993.701.167,00 dan ter realisasikan sebesar Rp. 1.922.447.796,00 dengan mencapai persentase 96,43 %. Dimana Laporan Realisasi Anggaran Belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya, Pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2018 ini dikatakan baik dan efektif karena capaiannya di atas 95 %.

Kemudian laporan realisasi anggaran belanja pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan yaitu dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanjanya mencapai 83,62 %, dan dapat dikatakan cukup baik /cukup efektif karena persentasenya di bawah 90 %. pelaksanaan realisasi anggaran belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, penyerapan anggarannya mencapai persentase 83,62% dimana anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp.1.850.067.000,00 dan anggaran tersebut hanya ter realisasikan sebesar Rp.1.547.092.474,00, maka terjadi silpa yaitu sebesar Rp.302.974.526, dilihat dari persentase pelaksanaan Realisasi Anggaran belanja pada tahun 2019 ini dikatakan cukup baik / cukup efektif dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. karena pada tahun 2017 realisasi anggarannya 96,08 % , pada tahun 2018

yaitu 96,43 % dan pada tahun 2019 realisasi anggaran belanjanya ada pada kisaran persentase 83,62%.

Kemudian realisasi anggaran di Kecamatan Sodonghilir pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2019, yang mana pada tahun 2020 anggaran belanja Kecamatan Sodonghilir yaitu sebesar Rp.1.582.267.000,00 dan ter realisasikan sebesar Rp.1.466.947.921,00, dengan capaian persentase 92,71.

Kementerian keuangan pada PMK 258 tahun 2015 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga yaitu mengenai minimal penyerapan anggaran sebesar 95%. Instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran minimal penyerapan anggaran sebesar 95% dan instansi tersebut mendapatkan predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Sisa anggaran pada instansi pemerintah tersebut dapat di pertanggungjawabkan, jika instansi pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan sisa anggaran tersebut maka ditahun depan akan mendapat sanksi yaitu pengurangan alokasi dana. Berdasarkan Permasalahan di atas, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmlaya dari Tahun 2017-2019, mengalami penurunan. Karena terjadinya realisasi anggaran belanja yang tidak memenuhi target, dalam data tabel di atas terlihat bahwa antara Anggaran dan Realisasi tidak sesuai dengan apa yang di inginkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi atau terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dalam realisasi anggarannya. Dengan data tersebut penggunaan anggaran pada instansi khususnya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten

Tasikmalaya pada tiap tahunnya mengalami pasang surut sehingga mempengaruhi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja.

Berdasarkan permasalahan di atas yang penulis temukan, bahwa belum optimalnya antara anggaran dan realisasi yang terdapat dalam pelaksanaan belanja daerah di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2019. dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Analisis Realisasi Anggaran Belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2020**”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja, antara anggaran belanja dengan realisasi belanja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memenuhi target, sehingga meimbulkan fluktuasi atau terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dalam realisasi anggaran belanja pada tahun 2017-2020
2. Terjadinya penurunan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2019, yang menyebabkan terjadinya (SILPA) atau sisa hasil pembiayaan anggaran belanja.
3. Penurunan penyerapan realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya SILPA itu terjadi karena tidak diserapnya beberapa mata anggaran di tahun anggaran tersebut.
4. Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tiap tahunnya mengalami pasang surut dalam realisasi anggaran belanja, sehingga mempengaruhi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada tahun 2017-2020 tersebut

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017-2020?
2. Bagaimana pencairan anggaran (pengeluaran) di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?
3. Bagaimana realisasi pendapatan di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?
4. Bagaimana pelaksanaan program di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017-2020?
2. Untuk mengetahui pencairan anggaran (pengeluaran) di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?
3. Untuk mengetahui realisasi pendapatan di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?
4. Untuk mengetahui pelaksanaan program di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2020?

### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berharap bisa memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat dalam penelitian ini yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Referensi tambahan, kemudian dapat menambah wawasan bagi pihak akademis serta sebagai gambaran bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Realisasi anggaran Belanja yang sesuai dengan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Laporan Keuangan Pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Yang Bersangkutan

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan kepada lembaga dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang akan membantu lembaga terkait, guna mendorong dalam peningkatkan pelaksanaan anggaran belanja dengan lebih baik di masa yang akan datang.

### b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan pada masalah yang terdapat dalam kehidupan nyata, dan untuk memenuhi salah satu tugas yang menjadi syarat akhir perkuliahan. Di harapkan dengan dilakukannya penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan ilmiah mengenai pelaksanaan anggaran belanja secara aktual, serta dapat mengembangkan teori yang dipraktikkan, dan bisa memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Hasil penelitian ini bisa sebagai tambahan Referensi khususnya mengenai Realisasi anggaran belanja daerah. Dan menjadi koleksi pustaka untuk menambah bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Terutama mahasiswa Jurusan Administrasi Publik. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi publik Menurut (Rahman, 2017:17) adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi administrasi sipil, yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), kemudian administrasi militer, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan/diselenggarakan oleh angkatan bersenjata. Administrasi publik merupakan proses ataupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang maupun suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Realisasi Anggaran yaitu poses yang harus di wujudkan menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi anggarannya dapat sesuai dengan harapan yang sudah di rencanakan/ditetukan. Menurut Mulyadi ( 2001:56 ) dalam Jurnal (Ramlah Basri 2013:203) menyatakan anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter. Menurut mahsun (2006:145) anggaran ialah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup

jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan anggaran jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal.

Menurut Robert & Vijay ( 2009:73 ) anggaran memiliki karakteristik – karakteristik sebagai berikut :

“anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut; dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter; biasanya meliputi waktu selama satu tahun; merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran; usulan anggaran di tinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran; setelah disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu; dan secara berkala, kinerja keuangan actual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.”

Realisasi Anggaran menurut (Indra Bastian, 2010: 239) realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Siklus realisasi anggaran menurut Indra Bastian dibagi kedalam tiga tahapan yaitu : (1) Pencairan Anggaran (Pengeluaran), (2) Realisasi Pendapatan, dan (3) pelaksanaan Program. Setiap tahapan kegiatan utama terbagi lagi kedalam kegiatan pertahapan yaitu; proses persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

“pencairan anggaran ( pengeluaran ), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas, kemudian tahap proses pelaksanaan yaitu terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, dan tahap penyelesaian yaitu penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktiva jasa “.

“Realisasi pendapatan, dimulai tahapan persiapan terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir, kemudian tahap proses pelaksanaan yaitu terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan, dan tahap penyelesaian yaitu terdiri dari rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenalan sanksi dan insentif”.

“Pelaksanaan program, yaitu dimulai dengan tahap persiapan, yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Kemudian tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, dan tahap penyelesaiannya yaitu terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan”.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG